



Mudik, Walikota Tagih

Tanggung Jawab Pejabat

YOGYA (KR) - Ketentuan kendaraan dinas untuk keperluan mudik Lebaran mendapat perhatian Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti. Kendati tak ada aturan khusus terkait penggunaan kendaraan dinas untuk mudik, namun ia bakal menagih tanggungjawab pejabat.

Menurut Haryadi, kendaraan dinas terbagi dalam dua jenis yakni kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional. Kendaraan dinas jabatan aturannya melekat pada pejabat eselon tertentu. Terutama kepala dinas, kepala kantor, kepala badan serta camat. "Kalau itu kan aturannya sudah jelas. Tinggal disesuaikan

kan saja dengan aturan. Tapi kalau kendaraan operasional, semuanya wajib dikendalikan. Tak hanya mobil, sepeda motor operasional juga berlaku sama," paparnya, Jumat (26/6).

Haryadi mengatakan, semakin tinggi jabatan pegawai di lingkungan Pemkot, seharusnya tanggungjawabnya semakin

tinggi. Oleh karena itu, terhadap kendaraan dinas jabatan, meski diperkenankan untuk keperluan pribadi, tetap harus dilandasi tanggung jawab. "Tak perlu aturan khusus. Tinggal nanti saya *tanting* saja, mana tanggungjawabnya," tandasnya.

Kabag Organisasi Setda Kota Yogyakarta, Kris Sarjono Sutejo, mengungkapkan kewenangan kendaraan jabatan selama ini memang melekat pada kepala dinas atau instansi, dan jumlahnya hanya satu unit di tiap SKPD. Sementara kendaraan operasional bentuknya bermacam-macam dan hanya

untuk mendukung kegiatan kedinasan.

Terkait jumlah PNS yang berasal dari luar daerah, menurut Kris Sarjono cukup banyak. Namun hanya sekitar wilayah DIY seperti Klaten, Boyolali dan Muntilan. Setiap hari, kendaraan jabatan juga selalu dikendarai untuk berangkat dan pulang kerja. "Memang lebih tepat jika pembatasannya itu pada kendaraan operasional karena rentan disalahgunakan. Jika walikota sudah mengatakan untuk *di-pool*-kan maka itu sudah cukup tegas kalau tidak boleh," tandasnya. (Dhi)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005